

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2021



KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA

Jl. Rotowijayan No. 6 Yogyakarta Telepon 376795
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan hidayahNya maka “**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021**” Kemantren Kraton dapat tersusun.

Laporan disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 .Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta telah menyusun pelaksanaan kinerja instansi atau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 dengan berdasarkan Perencanaan Stategis (RENSTRA) tahun 2017 - 2022

Kami berharap laporan ini dapat dipakai sebagai gambaran tentang kinerja Instansi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu upaya untuk dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijaksanaan yang akan datang.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, maka kami mohon saran dan masukan yang sifatnya membangun demi sempurnanya laporan selanjutnya.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Mantri Pamong Praja

Kemantren Kraton

Drs. Sumargandi, M.Si

NIP. 196903121989031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kemantren Kraton Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah KemantrenKraton yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis , sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Perangkat Daerah Kemantren Kraton yang dihasilkan di Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat

Dengan Indikatornya : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2021 adalah 364,67

Sasaran Program:

a. Indikator Program 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 85,25

b. Indikator Program 2

Angka Swadaya Murni

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2021 adalah Rp. 964.503.000,-

c. Indikator Program 3

Angka Pelanggaran Perda

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2021 adalah 38

Diluar indikator sasaran strategis dan sasaran program, pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kemantren Kraton juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Kemantren Kraton kedepannya, sebagai berikut :

1. Jumlah personil/pegawai yang ada di KemantrenKraton dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.

2. Sarana dan prasarana instansi kurang memadai
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat

Adapun langkah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala:

1. Mengusulkan ketinggian Kota Yogyakarta untuk pemenuhan jumlah personil sesuai anjab dan memberi motivasi bagi pegawai dikemantren Kraton untuk bisa bekerja dengan maksimal.
2. Mengusulkan pemenuhan sarana prasaran yang ada lewat RKBMD dan DPA Kemantren Kraton.
3. Membangun kultur birokrasi Kemantren yang inovatif dan responsive berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Menjalin kerjasama dengan stake holder dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
5. Mewujudkan pengembangan pelayanan kepada masyarakat berdasar sendi-sendi pelayanan prima dan berinovasi
6. Melakukakan koordinasi terus menerus dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Perangkat Daerah Kemantren Kraton dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Struktur Organisasi.....	I-1
1.2 Fungsi Dan Tugas.....	I-3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	I-10
1.4 Keadaan Pegawai.....	I-25
1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana.....	I-26
1.6 Keuangan.....	I-32
1.7 Sistematika LKIP.....	I-32
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II-1
2.1 Perencanaan Strategis.....	II-1
2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah	II-3
2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	II-3
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	II-6
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-9
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2021.....	II-9
2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah.....	II-10
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	III-1
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	III-2
3.1.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	III-13
3.2 Realisasi Anggaran.....	III-18
BAB IV PENUTUP.....	IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Rekapitulasi Pengaduan UPIK Tahun 2021.....	I-17
Tabel 1.2	Perubahan Regulasi dasar penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren.....	1-20
Tabel 1.3	Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan...	1-27
Tabel 1.4	Data Sarana dan Prasarana Kemantren Kraton.....	1-27
Tabel 1.5	Barang Inventaris Perolehan Tahun 2013-2021.....	I-30
Tabel 2.1	Tabel Review Renstra Kemantren Kraton.....	II-2
Tabel 2.2	Ringkasan Visi Misi RPJMD Tahun 2013-2021.....	II-4
Tabel 2.3	Sasaran Strategi Perangkat Daerah Kemantren.....	II-6
Tabel 2.4	Sasaran, Program dan Kegiatan.....	II-8
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	II-9
Tabel 2.6	Target Belanja Kemantren Kraton pada APBD Perubahan Tahun 2021...	II-10
Tabel 2.7	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis.....	II-11
Tabel 3.1	Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Kraton Tahun 2021....	III-1
Tabel 3.2	Perjanjian Kinerja Eselon IV Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemantren Kraton Tahun 2021.....	III-3
Tabel 3.3	Perjanjian Kinerja Eselon IV Program Koordinasi Ketentramana dan Ketertiban Umum Kemantren Kraton Tahun 2021	III-7
Tabel 3.4	Data Prosentase Angka Swadaya Murni Tahun 2021.....	III-9
Tabel 3.5	Dukungan Kemantren Kraton terhadap pencapaian Sasaran Daerah Tahun 2021.....	III-10
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Utama Kemantren Kraton.....	III-17
Tabel 3.7	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	III-17
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Utama Kemantren Kraton.....	III-18
Tabel 3.9	Penyandingan Target dan Realisasi RPJMD.....	III-20
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Anggaran 2021.....	III-25
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan.....	III-33

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren	I-2

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat:

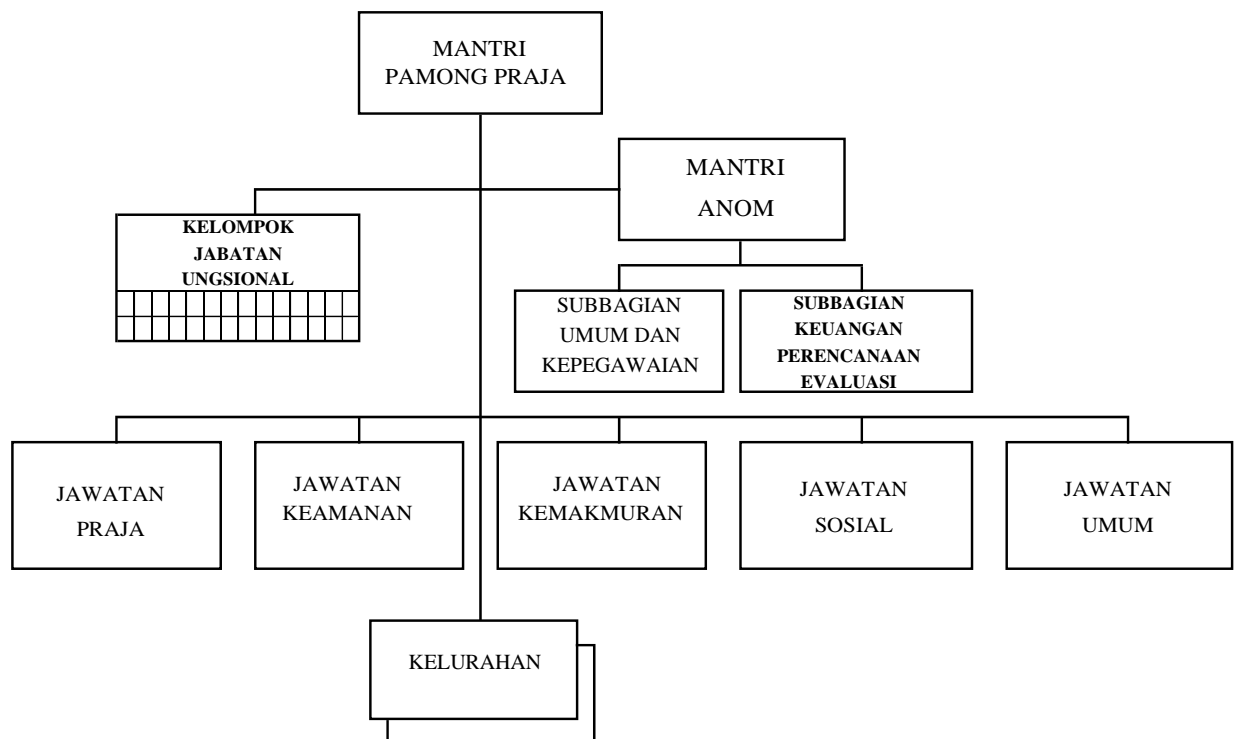
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
2. Mendorong Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan juga menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan , merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Kemantren



Daribagan Struktur Organisasi Kemantren Kraton tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Mantri Anom yang berada dibawah danber tanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja
- c. Masing-masing J a w a t a n dipimpin oleh seorang Kepala J a w a t a n yang berada dibawah danber tanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja

- d. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja

1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkatKemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasiKemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkatKemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkatKemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkatKemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkatKemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenanganKemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkatKemantren;

- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

A. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja, dipimpin oleh Mantri Anom. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
- c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengkoordinasian program kegiatan jawatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset

Kemantren;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
- g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Kemantren;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kemantren;
- l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ialah sebagai berikut :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian; c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;

- d. pengelolaan aset Kemantren;
 - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
 - i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
 - k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
 - l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
 - m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya adalah :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. penatausahaan keuangan Kemantren;

- d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
- h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
- i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
- j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
- k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
- l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
- m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;

- b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;
- e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
- f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
- h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
- i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
- j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
- k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;
- l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
- p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;

- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren.

Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
- b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
- d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
- e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
- f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;
- g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
- j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi

kewenangan Kemantren;

- l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - m. pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah Kemantren;
 - n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
 - p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
 - s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
 - t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
 - u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- D. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren. Adapun Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
 - c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

- d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
- f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
- i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
- j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
- k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
- l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
- m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
- n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
- s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan

- Kemakmuran;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- E. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
 - d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
 - f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
 - h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
 - l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;

- m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
- o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
- q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
- s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
- b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
- d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
- e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
- f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;

- g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
- i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
- j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
- k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
- l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
- m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
- p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut :
- 1) Efisien : memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
 - 2) Cepat : memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Akuntabel : dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
 - 4) Murah : biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
 - 5) Transparan : segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
 - 6) Non diskriminatif : tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
- b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Kraton terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure*)

Kemantren Kraton telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*),

kemudian dilanjutkan dengan memaklumkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Kraton telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (*Jogja Smart Service*), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas *play ground* di ruang tunggu pelayanan.

3) Pengelolaan *hotline* untuk mempermudah masyarakat Kemantren Kraton memperoleh informasi dengan berbagai media sarana. Hotline berupa aplikasi Whatsapp yang terhubung dengan berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Kraton. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT / RW se- Kemantren Kraton, jadi ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline kemantren. Informasi tersebut misalnya : pengumuman untuk berpartisipasi dalam memsukkseskan survey yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, informasi adanya kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Kraton yang diwajibkan memiliki kajian lingkungan dan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tentang vaksin, informasi perizinan pada Mal Pelayanan Publik, informasi layanan dokumen kependudukan dan informasi-informasi lainnya akan di sebar luaskan lewat hotline

kemantren, dengan harapannya Ketua RT/RW akan menyampaikan kepada warganya.

- 4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi

2. Pengelolaan Pengaduan

Isu strategis kedua yaitu pengelolaan pengaduan yang akan menjadi *feedback* bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kemantren Kraton. Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai media antara lain : melalui media UPIK (JSS), melalui surat dan melalui kotak pengaduan/datang langsung ke kantor Kemantren Kraton. Pengaduan yang masuk selanjutnya diproses sesuai dengan SOP yang sudah ada.

Tingkat responsivitas dalam pengelolaan pengaduan pada Kemantren Kraton masuk kategori baik karena di respon kurang dari 3 hari, sedangkan penyelesaian masalah yang melebihi 3 hari dikarenakan salah kategori atau permasalahan terkait dengan bangunan gedung atau permasalahan lainnya yang memerlukan koordinasi dengan OPD lain. Untuk pengaduan yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan atau ketugasan dari kemantren maka pengaduan tersebut akan diteruskan kepada yang memiliki kewenangan atau ketugasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berikut ini rekapitulasi pengaduan melalui UPIK selama Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) aduan dan telah diselesaikan oleh petugas sebanyak 100 % :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pengaduan UPIK Tahun 2021

No	Tgl Aduan Th 2021	Respon	Jenis Aduan	Ket
1.	2 Feb	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 3 Feb, selesai 2	Tarif parkir Plengkung Gading mahal	

		Maret		
2.	18 April	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 20 April, selesai 21 April	3 titik PJU kampung mati, lokasi sebelah barat masjid Margoyuwono	
3.	22 April	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 6 Mei, selesai 18 Mei	Fasilitas jalan kaca cembung Convex tidak layak pakai. Lokasi di Jl. Ngadisuryan	
4.	4 Mei	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 10 Mei, selesai 18 Mei	Tarif parkir Alkid mahal	
5.	2 Juli	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 7 Juli, selesai 16 Juli	Polusi dari pembakaran kayu atau sampah, lokasi Namburan Kidul No 06, sudah ditegur Pak RT sama saja.	
6.	13 Juli	15 Juli direspon dgn cek lokasi, 29 Juli selesai	Renovasi rumah 2 lantai untuk kuliner di jl. Nogosari, membuat kanopi/atap tritisan diatas trotoar milik pemerintah/negara.	
7.	14 Oktober	15 Oktober direspon, 19 Okt selesai	Semua anggota Paguyuban Alun-alun Kidul yang resmi sudah menurut untuk tidak berjualan, namun ada beberapa yg mbalelo dan itu satu trah keluarga	
8.	8 Desember	Salah Kategori	Lampu pertama dari	

		dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 15 Des, direspon 15 Des	masuk gapuro gang Kampung Kadipaten Wetan sudah 3 hari mati	
9.	11 Desember	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 28 Des, direspon 29 Des	Arahan parkir Tamansari yang menyesatkan dan pengunjung tidak dapat berjalan sendiri tanpa pemandu wisata.	
10.	20 Desember	Salah Kategori dikembalikan ke admin pusat, diterima admin OPD 28 Des, direspon 29 Des	Penempatan bangunan di bahu Jl Madyosuro Kelurahan Panembahan jogja depan griya pamengkayang sangat mengganggu lalu lintas.	

3. Isu strategis ketiga yaitu terkait kewenangan Mantri Pamong Praja dan jajaran dibawahnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam era reformasi struktural, untuk kemudahan berusaha maka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Selain itu aturan yang menghambat kemudahan berusaha juga terus dipangkas dan di saat yang sama prosedur berusaha dan investasi juga terus dipermudah. Hal ini bertujuan untuk mendukung iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam

kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (EoDB). Hal tersebut berarti negara Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balaikota Kota Timoho. Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Kraton :

Tabel 1.2
Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Kemantren Kraton

NO	Regulasi Baru	Regulasi Lama	HASIL PRODUK HUKUM
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019. 2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja 2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan

		menyelenggarakan Izin Mendirikan Bangunan	nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung, ukuran maksimal 1 m ² , dan tidak bersponsor dari produk tertentu. 3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja 4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan
--	--	---	---

4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak,

perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

5. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

6. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang

pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

7. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

1.4 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kemantren, menambah beban tugas. Di Kemantren Kraton yang membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 39 orang termasuk Pegawai Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sesuai anjab masih sangat kurang. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor Kemantren maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti perkembangan system administrasi sangat terbatas. Namun demikian keterbatasan jumlah SDM diharapkan tidak menghambat capaian kinerja yang targetkan..

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemantren Kraton yang mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak 39 orang pegawai, terdiri dari 29 orang pegawai tetap (PNS), 5 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 5 orang Tenaga teknis. Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Kraton terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah : 15 orang
SMA : 3 orang
D2/3 : 3 orang
S1 : 5 orang
S2 : 4 orang

Pegawai PNS Laki-laki :

Jumlah : 14 orang
SMP : 1 orang
SMA : 1 orang
D2/3 : 2 orang
S1 : 7 orang
S2 : 3 orang

Tabel 1.3

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

No	N A M A	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	Drs. Sumargandi, M.Si	Mantri Pamong Praja	IV / b	S-2

2	Sulasmi, SIP, M.SI	Mantri Anom	IV / a	S-2
3	Wanti, SIP	Kepala Jawatan Praja	III / d	S-1
4	Junidartig Junus, SIP, MM	Kepala Jawatan Kemakmuran	IV / a	S-2
5	Ari Widawati, ST, M.Eng	Kepala Jawatan Sosial	IV / a	S-2
6	Isniyarti Wuri Putranti, S.I.P. M.P.A	Kepala Jawatan Sosial	IV / a	S-2
7.	Eka Yunianta, S.Pd, M.Pd	Kepala Jawatan Keamanan	IV/a	S-2
8.	Sulistiyowati, SE	Kasubag Keuangan, PEP	III / c	S-1
9	Sesarius Chandra Yudhiantoro, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	III / c	S-1
10.	Ismiyatun	Bendahara	II / b	SMK
11.	Luliek Damayanti, A.Md	Penggerak Swadaya Masyarakat	II/c	D-III
12.	Dhanny Ulfa Triyastuti, S.A.P	Analisis DOKumen Perizinan	III/a	S-1
13.	Wisnu Karyanta, S.IP	Pengelola Adm Pem Seksi Pem Trantibum	III/d	S-1
14.	Giyono	Pengadministrasian Umum	I/d	SMP
15.	Agustina Tri Hutami	Pengadministrasi Kepegawaian	Naban	SLTA
16.	Nur Agustono	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Pereko	Naban	SLTA
	KEL. PATEHAN			
1	Handani Bagus Setyarso, S.Sos	Lurah Patehan	III/d	Sarjana
2	Dra. Sri Suprapti	Sekretaris Lurah	III/d	S-1-
3	Raden Mas Worosongko	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	III/c	SMA
4	Sri Kadarwati, A,Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/c	D-III
5	Eny Purwati	Kasi Perekonomian Pembangunan	III/c	SLTA
6	M. Faisol Fuadi Hs	Petugas Kebersihan	Naban	SLTA

	KEL. PANEMBAHAN			
1	Raden Murti Buntoro, S.H, M.I.P	Lurah Panembahan	III/d	S-2
2	Joko Aryanto, A.Md	Sekretaris Lurah	III/b	D-III
3	Sigit Hernawan, S.Pd	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	III/c	S-1
4	Triyatna, S.IP	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	III/b	S-1
5	Efi Widiastuti, S.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/d	S-1
6	M. Joko Saputro	Petugas Kebersihan	Naban	SMK
	KEL. KADIPATEN			
1	Baiq Suriyatningsih, B.A	Lurah Kadipaten	III/d	D-III
2	Gunawan Sigit Putranto, S.H	Sekretaris Lurah	III / b	S-1
3	Suwarto, SE	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban	III/c	S-1
4	Andriani Mulati Sari	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	III/c	SLTA
5	Raden Yohanes Vicentius W, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/c	D-III
6	Wahyu Deni Yananto	Petugas Kebersihan	Naban	D-III

1.1.1 Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kemantren. Kraton Tahun 2021

1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya penataan ruang pelayanan di Kemantren, namun masih dirasakan kurang memadai dikarenakan keterbatasan tempat dengan menyesuaikan jumlah pegawai jika jumlah pegawai nantinya tersedia sesuai

formasi anjab. Sarana prasarana harus lebih ditingkatkan mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu OPD, berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Kraton.

Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Kraton

NO	SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH
No	Nama/Jenis/Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	Mesin Pompa Air	1
2	Stationary Generating Set	1
3	Station Wagon	1
4	Gerobak Dorong	3
5	Alat Ukur	1
6	Tempat Tidur Besi	2
7	Wastafel	43
8	Sepeda Motor	13
9	Kendaraan Bermotor Roda 3	1
10	Sepeda	8
11	Mesin Gergaji	1
12	Mesin Ketik standar	4
13	Mesin Ketik	5
14	Mesin Hitung Elektronik	11
15	Mesin Absen	2
16	Lemari Besi	15
17	Lemari Kaca	3
18	Rak Besi	3
19	Rak Kayu	3
20	Kardex Besi	5
21	Filing Cabinet Besi	29
22	Filling Cabinet Kayu	1
23	Brandkas	3
24	Lemari Sorok / Pustaka	5
25	Papan Pengumuman	38

26	Papan Tulis	5
27	Papan Absen	1
28	Papan Visual/Papan Nama	3
29	Papan Nama Instansi	6
30	White Board	17
31	Peta Wilayah	3
32	Pemotong Kertas	1
33	Lemari Kayu	25
34	Bangku Tunggu Kayu	9
35	Zice	5
36	Meubelair	12
37	Meja Rapat	35
38	Meja Ketik	12
39	Meja Kerja Besi/Metal	5
40	Meja Kerja Kayu	19
41	Meja Telepon	1
42	Meja Resepsionis	2
43	Meja Panjang	8
44	Meja Makan Kayu	1
45	Kursi Rapat	74
46	Kursi Tamu	7
47	Kursi putar	19
48	Kursi Lipat	383
49	Kursi Kayu	4
50	Kursi Biasa	23
51	Sofa	1
52	Meja Komputer	17
53	Meja Kerja 1/2 Biro	34
54	Jam Mekanis	2
55	Jam Elektronik	17
56	Kompor Gas (Alat Dapur)	4
57	Alat Pendingin	5
58	A.C. Window	1
59	A.C. Split	10
60	Kipas Angin	30
61	Exhaous FAN	2
62	Radio FM	2
63	Televisi	8
64	Tape Recorder	1
65	Amplifier	3
66	Equalizer	1
67	Loudspeaker	7
68	Sound system	4
69	Laser Disc	1
70	Wireless	5
71	Microphone	7
72	Microphone Floor Stand	2

73	Microphone Table Stand	1
74	UPS	19
75	Stabilisator	3
76	Lambang Garuda Pancasila	5
77	Gambar Presiden/Wakil Presiden	10
78	Tangga Lipat/Alumunium	4
79	Dispenser	8
80	Alat Pemadam Kebakaran	48
81	Pompa Kebakaran/Portable	1
82	PC Unit	39
83	Komputer Jaringan	1
84	Notebook	5
85	Tablet PC	1
86	Printer	38
87	Scanner	1
88	LCD Projector	9
89	Kamera Digital	7
90	Layar LCD Projector	3
91	Handy Talky (HT)	9
92	Megaphone	5
93	Timbangan Orang	1
94	Tiang Bendera	2
95	Handrailing Difable	1
96	Telephone (PABX)	2
97	Telephone	1
98	Pesawat Telepon	17
99	Telephone Mobile	1
100	Facsimile	2
101	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	4
102	Timbangan Bayi	18
103	Alat Peraga Edukatif (APE) Playground	1
104	Rambu Jalan	30
105	Rambu Cermin	8
106	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5
107	Alat Tennis Meja	18
108	Alat Rumah Tangga Lainnya	15
109	Alat Kedokteran Umum	4
110	Peralatan Komputer Lainnya	1
111	Peralatan Permainan	1
112	Alat Kantor Lainnya	4
113	Ilmu Pengetahuan Umum	64
114	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	4
115	Sosiologi	1
116	Ekonomi	2
117	Hukum	8
118	Service Umum Sosial	3
119	Pendidikan	1

120	Etnografi, Cerita Rakyat	2
121	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1
122	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	62

Tabel 1.5
Barang Inventaris Perolehan Tahun 2013-2021

NO	SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH
No	Nama/Jenis/Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	Stationary Generating Set	1
2	Station Wagon	1
3	Gerobak Dorong	3
4	Alat Ukur	1
5	Tempat Tidur Besi	2
6	Wastafel	43
7	Sepeda Motor	8
8	Kendaraan Bermotor Roda 3	1
9	Sepeda	3
10	Mesin Gergaji	1
11	Mesin Ketik	2
12	Mesin Absen	1
13	Lemari Besi	2
14	Lemari Kayu	3
15	Filing Cabinet Besi	3
16	Papan Visual/Papan Nama	2
17	White Board	9
18	LCD Projector	7
19	Layar LCD Projector	3
20	Papan Nama Instansi	1
21	Papan Pengumuman	31
22	Meubelair	4
23	Meja Kerja Besi/Metal	5
24	Zice	1
25	Meja Resepsionis	2
26	Meja Kerja 1/2 Biro	5
27	Kursi Rapat	58
28	Bangku Tunggu Kayu	8
29	Kursi Lipat	60
30	Meja Komputer	2
31	Sofa	1
32	Jam Mekanis	2
33	Jam Elektronik	3

34	Alat Pendingin	5
35	A.C. Split	7
36	Kipas Angin	13
37	Exhaust FAN	2
38	Kompas Gas (Alat Dapur)	4
39	Alat Rumah Tangga Lainnya	11
40	Televisi	3
41	Amplifier	2
42	Loudspeaker	3
43	Sound system	2
44	Wireless	1
45	Megaphone	4
46	Microphone	6
47	Microphone Floor Stand	1
48	Microphone Table Stand	1
49	Tangga Lipat/Aluminium	3
50	Dispenser	4
51	Alat Pemadam Kebakaran	24
52	Pompa Kebakaran/Portable	1
53	Kamera Digital	5
54	Handrailing Difable	1
55	Telephone (PABX)	2
56	Telephone	1
57	Pesawat Telepon	10
58	Handy Talky (HT)	8
59	Timbangan Bayi	18
60	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	4
61	Alat Peraga Edukatif (APE) Playground	1
62	PC Unit	25
63	Notebook	4
64	Printer	23
65	Scanner	1
66	UPS	15
67	Rambu Jalan	22
68	Rambu Cermin	8
69	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5
70	Alat Tennis Meja	18
71	Alat Kedokteran Umum	4
72	Peralatan Komputer Lainnya	1
73	Peralatan Permainan	1
74	Peta Wilayah	3
75	Ilmu Pengetahuan Umum	64
76	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	4
77	Sosiologi	1
78	Ekonomi	2
79	Hukum	8
80	Service Umum Sosial	3

81	Pendidikan	1
82	Etnografi, Cerita Rakyat	2
83	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari APBD Perubahan Kota Yogyakarta. Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.988.909.139,- dengan rincian belanja pegawai Gaji dan TPP sebesar Rp 4.553.994.180 ,- dan belanja Barang Jasa sebesar Rp 2.864.609.229 serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.578.994.730,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD Perubahan sebesar Rp 8.988.909.139,- didukung oleh 4 program dan 14 kegiatan serta 37 Sub Kegiatan.

1.7 Sistematika LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Juga ditulis pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas serta kolaborasi lintas sektoral yang mendukung capaian kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perlu diketahui bahwa dengan adanya Permandagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kecamatan Kraton menjadi Kemantren Kraton mulai Tahun 2021.

Pada awal Tahun 2021 Anggaran Kemantren Kraton berfokus pada recovery untuk pemulihan masyarakat terdampak Covid-19 seperti pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan pendapatannya.

Pada Bulan April 2021 Kemantren Kraton melakukan review Renstra karena realisasi sasaran OPD, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan untuk Tahun 2021 sebesar 364,67 sudah melebihi target Tahun 2021 dan Tahun 2022. Untuk target Tahun 2022 tidak dapat dilakukan review karena merupakan target akhir renstra.

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 sudah melebihi target Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga target Tahun 2021 disamakan dengan target Tahun 2022, karena target Tahun 2022 tidak dapat dilakukan review karena merupakan target akhir renstra.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2020 sudah melebihi yang ditargetkan . Target tahun 2021 nilainya sama dengan target Tahun 2022. Untuk target Tahun 2022 tidak dapat dilakukan review karena merupakan target akhir renstra.

Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2021 dan Tahun 2022 di lakukan review karena angka pelanggaran perda yang ditargetkan terlalu besar, dengan melihat realisasi angka pelanggaran perda TW 1 hanya 16 pelanggaran, maka target angka pelanggaran Perda untuk Tahun 2021 direview dari 240 menjadi 100 kali dan untuk tahun 2022 dari 230 menjadi 90 kali.

Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kemantren Kraton Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Kraton Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Berikut data indikator Sasaran dan Indikator Program beserta reviewnya yang telah dilaksanakan Kemantren Kraton :

Tabel 2.1

Tabel Review Renstra Kemantren Kraton Tahun 2021

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review
							2022
Target	300	306	320	341,67	346,67	351,67	351,67
Realisasasi	251.33	362.33	353	350,67	364,67	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	75,19	75,69	76,19	77,19	77,19	77,69	77,69	77,69
Realisasasi	75,24	80,01	80,37	81,75			-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Kraton

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	10	12	12	14	15	-	-	-
Realisasasi	29	25	26,77	-	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	429.601.667	429.601.667	429.601.667	429.601.667	429.601.667
Realisasasi	-	-	-	985.272.500	-	-		

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	-	240	230	100	90
Realisasasi	-	-	-	-	-	-		-

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.2
Ringsan Visi Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat

		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Kraton mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

1. Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan.
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan menurun.
3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Pola pangan harapan.
4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, dengan indikator capaian sasaran: Indeks ketimpangan pendapatan.
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Angka pertumbuhan ekonomi.
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, dengan indikator capaian sasaran: Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda.
7. Kualitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah.
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat dengan indikator capaian sasaran: Angka harapan hidup.
9. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Persentase rintisan desa budaya yang aktif.
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
11. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Indeks kualitas lingkungan hidup.

12. Infrastruktur Wilayah Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Indeks infrastruktur wilayah
13. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Kraton selama 5 tahun anggaran adalah “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 300, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 351.67.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Perangkat Daerah Kemantren Kraton

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	351,67

2.1.3 Strategi, Program Dan Kegiatan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran untuk lebih memberikan gambaran implementatif tercapainya cita-cita pembangunan Daerah. Sasaran dan Kebijakan ini yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD dalam setiap tahunnya.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam kerangka perencanaan strategis di Kemantren Kraton adalah dengan menetapkan program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan

- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan
- c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten

Sasaran, Program dan Kegiatan Kemantren Kraton dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Tingkat perkembangan pembangunan KemantrenKraton Meningkat		
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Adimintrasi Keuangan 3. Administrasi Umum 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 2. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Panembahan 3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten

2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA Kemantren Kraton.

Pada tahun 2021, Kemantren Kraton melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan maupun output kegiatan sehingga seharusnya dilaksanakan Perubahan Indikator Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Kemantren Kraton tetapi dikarenakan realisasi sasaran strategis Kemantren Kraton Tahun 2021 sudah melebihi yang ditargetkan yaitu 364,67 dan target Tahun 2022 sebesar 351,67 juga sudah dibawah capaian Tahun 2021 sehingga untuk Perjanjian Kinerja Perubahan Kemantren Kraton tidak mengganti angka Target di Perubahan. Perjanjian Kinerja Perubahan Kemantren Kraton Tahun 2021 seperti table dibawah ini :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan 2021
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan KemantrenKraton	346,67

2.3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2021

Anggaran murni Kemantren Kraton Tahun 2021 sebesar Rp 8.381.118.171,- dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai Gaji TPP Rp 3.997.876.102,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp 3.146.798.069,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.236.444.000,-, Selanjutnya pada Triwulan IV Kemantren Kraton melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menata anggaran dengan menggeser rekening dan menghapus yang tidak tersealisasi serta mengakomodir usulan-usulan skala prioritas dari pokok-pokok pikiran Dewan sehingga pagu anggaran di Perubahan Anggaran menjadi Rp. 8.988.909.139,- dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai Gaji TPP Rp. 4.545.305.180,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.864.609.229,- dan Belanja Modal Rp. 1.578.994.730,-.

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.6
Target Belanja Kemantren Kraton
Pada APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian	Target
Belanja Operasi:	
- Belanja Pegawai (Gaji dan TPP)	Rp. 4.545.305.180,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.864.609.229,-
Belanja Modal	Rp. 1.578.994.730,-
Jumlah	Rp. 8.988.909.139,-

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2021 Kemantren Kraton yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

Sasaran	Anggaran	Prosentase (%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	603.137.199,-	100%
1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	239.006.750,-	100%
2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	82.880.419,-	100%
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	281.250.030,-	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.464.800,-	100%
1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.501.700,-	100%
2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	42.963.100,-	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.666.683.736,-	100%
1) Pemberdayaan Kelurahan Patehan	730.055.185,-	100%
2) Pemberdayaan Kelurahan Patehan	927.759.052,-	100%
3) Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten	923.471.072,-	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 2021

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada Sub Bab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Kemantren Kraton sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan **sasaran strategis** tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton yang juga dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Kraton tahun 2021 beserta realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Kraton
Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Tingkat perkembangan pembangunan KemantrenKraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan KemantrenKraton	346,67	364,67

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton meningkat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	77,69	85,25
2	Pelanggaran Perda di Kemantren Kraton menurun	Jumlah Pelanggaran Perda	100	38
3	Swadaya Masyarakat Kemantren Kratonmeningkat	Angka Swadaya Murni	Rp429.601.667	Rp. 964.503.000

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kraton memiliki 3 (tiga) sasaran program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 77,69 telah terealisasi 85,25 Selanjutnya sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Kraton menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 100 telah terealisasi 38, dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Kraton meningkat dengan indikator program angka swadaya murni dengan target Rp 429.601.667 telah terealisasi sebesar Rp 964.503.000

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton meningkat, didukung oleh kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegaitan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan subkegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja Eselon IV
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kemantren Kraton Tahun 2021

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Output Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Musrenbang Kecamatan Kraton - Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan - Evaluasi Kelurahan - Pengukuhan RT dan RW se kecamatan Kraton - Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung - Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/RW - Penyusunan Data Monografi Kelurahan - Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan - Peringatan HUT Kemerdekaan RI - Sosialisasi pemilihan RT dan RW - Integrasi Perencanaan Kewilayahan - Sinergisitas peran RT dan RW dalam pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 dokumen 3 dokumen 1 kali 218 orang 276 orang 276 orang 4 dokumen 3 dokumen 1 kali 218 lembaga 3 kel 3 kel
2	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek UMKM dan Gapoktan - Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec. Kraton - Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 hari 2 hari 4 kali
3	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Pelayanan yang terkait perizinan - Sosialisasi Pelayanan Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 180 orang
4	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - Sosialisasi Jogja Smart Service - Sosialisasi Pelayanan Publik dan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 70 orang 70 orang

	terkait dengan Non Perizinan	Adminduk	
5	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta - Festival Olah Raga Tradisional - Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan - Forum TKPK Kecamatan Kraton - Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian Kegiatan Kelompok PKK RT dan RW - Forum TP PKK Kecamatan Kraton - Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota - Lomba KKG PKK KKBPK Kes - Monitoring dan Rakordasi PAUD Sejenis Kecamatan Kraton - Monitoring Tim KKG Kec. Ke Kel. - Pawai Budaya (WJNC) - Pelatihan Line Dance dan Senam Kreasi - Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah - Pelatihan Mitigasi Bencana - Pelatihan PMKS di Bidang Makanan Ringan, Packing dan Pemasaran - Penyuluhan TB - FGD Stunting - Penyuluhan FPRB - Penyuluhan Pokdarwis - Penyuluhan Manajemen Gandeng Gandong - Penyuluhan Obat Terlarang - Penyuluhan Pengurus FPKK Kec. Kraton - Penyuluhan Permensos No. 10 Tahun 2019 - Penyuluhan PSKS - Penyuluhan Strategi pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahan/Kecil - Senam Lansia - Senam Rutin Perwosi - Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita - Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis B2SA - Workshop RAPBS GOPTKI 	<ul style="list-style-type: none"> 3 kelurahan 60 orang 10 bulan 32 orang 3 kelurahan 12 bulan 20 orang 30 orang 40 SPS 30 orang 15 orang 33 orang 3 hari 40 orang 30 orang 40 orang 40 orang 30 orang 30 orang 30 orang 3 kelurahan 35 orang 30 orang 35 orang 35 orang 30 orang 35 orang 55 orang 15 kali 60 orang 20 orang 30 orang

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 603.137.199,- dan terealisasi sebesar Rp 588.842.260 atau 97,63%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren
2. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton
3. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan
4. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
5. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 77,69 dan realisasi 85,25 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren yang dilaksanakan Jawatan Praja . Dengan adanya pelaksanaan musrenbang yang mampu mengakomodir usulan masyarakat dari level RT, RW hingga kampung hingga bisa masuk menjadi renja Kemantren akan menumbuhkan rasa puas pada masyarakat, dan pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Bimtek UMK, gelar potensi UMKM , terlaksananya koordinasi forkom UMKM dan Gapoktan akan mendorong tumbuhnya perekonomian di warga masyarakat sehingga akan mendukung rasa kepuasan pada warga masyarakat. Selanjutnya pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan yang dilaksanakan di Jawatan Umum dengan adanya pelayanan di

Kemantren Kraton seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mhs dr univ di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mhs dr luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Izin satgas covid, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, Mengetahui penduduk kemantren kraton untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilakukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsapp hotline Kemantren Kraton dimana manfaat hotline itu berupa whatsapp kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Kraton, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam memsuksesan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Kraton yg memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tentang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, informasi layanan capil dan informasi informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat. Kemudian pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan adanya pelatihan bagi masyarakat seperti Pelatihan PMKS di Bidang Makanan Ringan, Packing dan Pemasaran , penyuluhan strategi pemasaran bagi pelaku usaha rumahan / kecil serta penyuluhan manajemen gendeng gendong makan akan mendukung pengentasan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sehingga akan menumbuhkan kepuasan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program pelanggaran perda di Kemantren Kraton menurun, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada dengan sub kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kemantren
Kraton Tahun 2021

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Output Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Terlaksanya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Pengamanan masyarakat - Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan - Koordinasi Linmas Kecamatan - Pengadaan peralatan operasional - Pengisian tabung Pemdam Kebakaran - Penyuluhan jaga warga 	<p>2 kali</p> <p>3 kali</p> <p>3 kali</p> <p>6 kali</p> <p>2 kali</p> <p>43 tabung apar</p> <p>40 orang</p>
2.	Terlaksananya koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dn/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Forkopimca - Operasi Ketertiban masyarakat - Penyuluhan PKL - Sosialisasi Pondokan - Fasilitasi PPKM 	<p>11 kali</p> <p>11 kali</p> <p>25 orang</p> <p>20 orang</p> <p>32 kali</p>

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 96.464.000 dan terealisasi Rp 94.106.000 atau 97,55%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksanya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Terlaksananya koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dst.

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 100 kali pelanggaran dan terealisasi 38 kali, hal itu didukung pelaksanaan sasaran sub kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, pemantauan wilayah dan sosialisasi / penyuluhan seperti Penyuluhan PKL, Sosialisasi Pondokan, dan adanya koordinasi-koordinasi seperti Koordinasi

Forkopimca dan koordinas Linmas maka akan mendukung penurunan jumlah pelanggaran perda.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Kraton meningkat, didukung oleh kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Patehan , Panembahan, Kadipaten) dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten), Pemberdayaan Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten).

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 2.666.683.736 dan terealisasi Rp 2.581.285.309 atau 96,80%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Patehan
2. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Panembahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kadipaten
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan
5. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan
6. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kraton

Sasaran subkegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu angka swadaya murni sebesar Rp. 429.601.667 dan terealisasi sebesar Rp. 964.503.000, hal itu didukung dengan adanya Kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Kraton (Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten) untuk kepentingan lingkungannya terutama dalam masa pandemi bersemangan untuk berbagi dan berswadaya serta kepedulian warga masyarakat untuk membangun wilayahnya sawadaya murni tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya murni dalam skala kecil sesuai kemampuan masing2 untuk membangun wilayahnya. Dan juga seperti pelaksanaan Penyemprotan desinfektan tdk bisa seluruhnya ditanggung pemerintah maka masyarakat Kemantren Kratonpun berswadaya agar penyemprotan tetap terlaksana biarpun harus berswadaya.

Tabel 3.4
Data Prosentase Angka Swadaya Murni Tahun 2021

No.	LPMK	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%
1.	Kelurahan Patehen	90.380.000,-	232.029.000,-	256,73
2.	Kelurahan Panembahan	137.437.500,-	389.874.000,-	283,67
3.	Kelurahan Kadipaten	120.250.000,-	342.600.000,-	284,91
		429.601.667,-	964,503,000,-	224,51

Selain capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Kemantren Kraton juga mendukung pencapaian Sasaran Daerah, seperti table dibawah ini :

:

Tabel. 3.5
Dukungan Kemantren Kraton terhadap Pencapaian Sasaran Daerah
Tahun 2021

SASARAN	URAIAN AKTIVITAS YANG DILAKSANAKAN	REALISASI SASARAN PENERIMA MANFAAT	INOVASI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI KE DEPAN
SASARAN 1 KEMISKINAN MASYARAKAT MENURUN	Melaksanakan Pelatihan pada PMKS maupun keluarganya untuk membuat Makanan Ringan berikut Packing dan Pemasarannya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan keluarganya		potensi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi	aksesibilitas dan konsistensi	pelatihan berkesinambungan
	1. Melaksanakan koordinasi forum TKPK di kemantren dan kelurahan dan penyusunan rapor keluarga di kelurahan. 2. Merevisi Data Penerima Bantuan yang benar -benar berdomisili di Wilayah Patehan, Panembahan, Kadipaten	Masyarakat Miskin (sekitar 1.300 KK Miskin)		peran serta masyarakat dan ketekunan surveyor dalam penyusunan rapor keluarga	Dinamika Kependudukan (meninggal/pindah)	Sering mengadakan pertemuan dan mencari penggantinya
	Terselenggaranya Pelatihan Pertanian dan cara pengairan sederhana	Gapoktan	Pengetahuan dan ketrampilan menanam	Mendorong masyarakat memanfaatkan lahan terbatas	Lahan terbatas	Tanamanisasi berbasis Kampung

SASARAN 2 KEBERDAYAAN MASYARAKAT MENINGKAT	Melaksanakan Penyuluhan Management/pengelolaan bagi para pengusaha yang tergabung dalam Gandeng-Gendong dan Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahan/Kecil	UP2K PKK, UPPKS + UMKM		Keinginan pengusaha yang ingin meningkatkan kualitas usahanya	Ketidaktahuan cara dalam mengelola usaha yang lebih baik	Pelatihan dan praktik berkesinambungan
	Terselenggaranya Pelatihan Tabulapot, Tanaman Toga dan draenase Sistem tetes	Gapoktan	Pengembangan jenis tanaman sesuai fungsinya	Semangat mengikuti pelatihan	Lahan terbatas	Memanfaatkan Kampung dan Lorong Sayur berbasis Wilayah
SASARAN 3 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MENINGKAT	Adanya Kelompok Tani dan kelompok peternak	Semua warga Kelurahan Panembahan	Terbentuknya Kelompok Tani Lumbung Binangun Mataram dan Peternak Lele	Dampak Pandemi	Semangat Warga menurun	Memberikan Motivasi bahwa dengan adanya kelompok Tani maupun peternak dapat meningkatkan perekonomian
	Terselenggaranya Gelar Potensi UMKM dan Pertanian	Pelaku Usaha Mikro Kecil	Cantelan beranekan jenis dan konsultasi pertanian	Warga masyarakat	Kurangnya partisipan	Kolaborasi kegiatan agar lebih meriah
	Pelatihan budidaya lele cendol	Warga masyarakat Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten	Gerkana dari Pemerintah Kota Yogyakarta	Keinginan masyarakat ekonomi dan gizi	Kurangnya sarpras dan lahan	Menyediakan lahan dan pelatihan berkesinambungan untuk diversifikasi hasil olahan lele

SASARAN 4 KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PENDUDUK MENURUN	Tersusunnya Dokumen terintegrasi 3 Kelurahan se Kemantren Kraton	Warga masyarakat		Peran serta pemangku wilayah berbasis kampung dalam menyusun branding kampung dan perencanaan wilayah dalam 5 tahun ke depan	belum semua warga masyarakat tahu tentang adanya dokumen terintegrasi, masih harus disosialisasikan /disampaikan pada pengurus baru khususnya RT RW periode 2022 - 2024	
SASARAN 5 PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT	Terselenggaranya Pelatihan Pertanian dan Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan	UMK dan Gapoktan	Kolaborasi UMKM dan Pertanian	Partisipasi masyarakat	Kurangnya koordinasi dan komunikasi	Ciri khas wilayah menjadi daya tarik wisata
SASARAN 6 GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MENINGKAT	Penegakan PPKM, Operasi Penegakan Perda, Pam Linmas	Warga Masyarakat, Wisatawan Pengunjung, PKL, Forkopimca	Kolaborasi Satgas Covid-19 dengan Jogoboyo Keamanan Alun-Alun Selatan	Semangat Warga Masyarakat Untuk Mewujudkan Lingkungan yang Tertib dan Aman	Kesadaran warga masyarakat dan para wisatawan	Pembinaan Kepada Warga Masyarakat Untuk Selalu Menjaga Keamanan dan Ketertiban di masing-masing wilayah
SASARAN 7 KUALITAS PENDIDIKAN MENINGKAT	Menggalakkan kembali Jam Belajar Masyarakat	Anak usia sekolah	Mengurangi pemakaian Gadget dan Jadwal JBM di aktifkan kembali	Minat baca anak ditumbuhkan	Kegiatan Jam Belajar Masyarakat tidak berjalan	Mendorong Perangkat Kampung, RW dan RT untuk mengingatkan kembali JBM agar di giatkan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Kemantren dan Kelurahan	Pembentukan Pokja Bunda PAUD, Workshop PAUD, Rakordasi PAUD	Tempat Pendidikan anak Usia Dini cukup banyak	Pendidikan Anak Usia Dini kurang mendapatkan perhatian pada saat pandemi	Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif

SASARAN 8 HARAPAN HIDUP MASYARAKAT MENINGKAT	Melaksanakan Senam Lansia secara periodik	Warga lansia se Kemantren Kraton	Kegiatan Rutin di Kemantren Kraton	Keinginan warga lansia untuk selalu bersilaturahmi dan beraktivitas	Keterbatasan lansia dalam pergerakan	
	Melaksanakan Penyuluhan Obat Terlarang, untuk mengedukasi masyarakat akan bahayanya narkoba dan obat terlarang lainnya	PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan klain-lain		Keinginan warga untuk hidup lebih sehat	Masih banyak warga (terutama usia muda) yang tidak menyadari bahaya za-zat tersebut	
	Pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan berbasis B2SA dan rajin berolah raga / aktivitas fisik	Warga Kemantren Kraton, anak sekolah	1. Menu makanan selain beras / terigu , rendah lemak 2. Program "menanam apa yang dimakan, memakan apa yang ditanam"	Keinginan warga untuk hidup sehat	Tidak Semua warga secara ekonomi mampu menyediakan makanan Sehat	Memberikan Penyuluhan Menu Sehat dengan Harga Yang Terjangkau (lorong sayur, kampung sayur)
	Penanganan Stunting, dengan memperhatikan cara pengukuran panjang badan yang tepat	Balita Stunting	Sosialisasi dan Pembelian alat Infantometer untuk 18 posyandu di Kelurahan Panembahan	Keinginan warga untuk hidup lebih sehat	Tidak semua warga memiliki pemahaman bahwa stunting dapat mempengaruhi masa depan anak	Sosialisasi secara intensif dan pemberian PMT

	Penanganan TB (termasuk pemeriksaan dan pengobatan)	Warga dan ASN	Sosialisasi dan kegiatan Zero TB (bus TB)	Keinginan warga untuk hidup lebih sehat	Tidak semua warga memiliki pemahaman bahwa TB sangat mudah menular dan dapat menjadi kebal	Sosialisasi secara intensif dan pengawasan pemberian obat
SASARAN 9 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN BUDAYA MENINGKAT	Pembentukan Forum Kesenian Kemantren Kraton untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan di wilayah Kemantren Kraton	Warga Kemantren Kraton	Pembentukan Forum	Keinginan warga terutama pelaku kesenian untuk bersinergi	Adanya kesenjangan antara kelompok pelaku kesenian yang sudah mapan maupun yang masih merintis	Penguatan forum dalam melaksanakan fungsinya dalam pemberdayaan kebudayaan
	Mengadakan Dialog Budaya	Semua warga Kelurahan Panembahan	Mengadakan Kegiatan yang Berhubungan dengan Budaya	Kemauan Warga untuk melestarikan Budaya	Keterbatasan Anggaran	Membuat Event Khusus yang Berhubungan dengan Budaya
	Pisungsung Ruwahan	Warga Kadipaten	Rutin dilaksanakan tiap tahun di bulan Ruwah	Keinginan warga untuk melestarikan tradisi	Warga belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri (misalnya tanpa dukungan APBD)	Sedikit pengurangan anggaran dari APBD untuk memancing motivasi warga melestarikan tradisi Ruwahan secara mandiri
SASARAN 10 KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG MENINGKAT	Kemantren mendukung sebatas kordinasi-kordinasi	-	-	-	-	-

SASARAN 11 KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Penghijauan di wilayah	Semua warga Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten	Pembuatan Lorong sayur dan kampung sayur	Antusias warga yang baik	Tidak semua warga mendukung kegiatan tersebut	Memberikan Pengertian ke warga untuk swadaya menanam di lingkungan rumahnya masing-masing
SASARAN 12 INFRASTRUKTUR WILAYAH MENINGKAT	Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat. Kegiatan yang dilakukan di wilayah adalah paving block dan conblock, sehingga jalan menjadi tidak becek.	warga masyarakat pengguna	Pemerataan pembangunan merupakan jawaban atas masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antar wilayah	pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa	minimnya warga masyarakat akan membayar pajak untuk pembangunan	Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
SASARAN 13 KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENINGKAT	Terlaksananya Inovasi Satu Pintu Tiga Jendela dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat	Sasaran penerima manfaat adalah tokoh masyarakat, seluruh Ketua RT, RW, PKK, Kampung, LPMK se Kemantren Kraton	Menyampaikan informasi melalui media whatsapp serta dihubungkan (link)dengan website, facebook dan instagram	Adanya kemajuan teknologi (IT) yang memperlancar tersampainya informasi	Masih adanya warga masyarakat yang belum mengetahui inovasi ini, serta masih ada warga masyarakat yang gaptek	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait inovasi Satu Pintu Tiga Jendela ini

	Terselenggaranya pelayanan proses IUMK bagi pelaku Usaha (UMK)	Pelaku Usaha Mikro Kecil	Pendampingan Proses IUMK	Pengurusan IUMK warga masyarakat untuk BPUM	Belum semua masyarakat memahami	Berbasis Email dan NIK, masyarakat mandiri
	Tahapan pengelolaan IKM yaitu meliputi kegiatan penyusunan kuesioner, menentukan jumlah responden, membagikan kuesioner secara online melalui No HP pemohon, mengolah nilai IKM, menyusun laporan, dan mempublikasikan nilai IKM.	masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik akan diuntungkan dengan perbaikan kualitas layanan yang dilakukan secara kontinyu	Inovasi dengan IKM online	Seiring kemajuan teknologi, IKM Kemantren Kraton sudah dilaksanakan secara online, sehingga memudahkan pengolahan data, dan efisiensi waktu dan SDM pengolah IKM	1. Tidak semua pemohon memiliki HP sehingga dibantu oleh petugas menggunakan fasilitas dari kemantren 2. Tidak semua pemohon melek teknologi, dan lebih familier dengan kuesioner manual	
	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan Kemantren	warga masyarakat	-	Peran serta pemangku wilayah /Ketua RT RW , Ketua Kampung dan Ketua LPMK	Tidak semua usulan warga masyarakat baik fisik maupun kegiatan non fisik bisa terakomodir dalam pelaksanaan musrenbang jadi pasti ada skala prioritas	
	Terlaksananya pemilihan RT RW Periode 2022 - 2024	Terpilihnya pengurus RT RW periode 2022 - 2024	-	kesadaran pemangku wilayah untuk tertib administrasi kependudukan	terkadang sulit mencari kader pengurus RT RW	
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas RT RW dan Kampung	Ketua RT RW dan Kampung lebih memahami ketugasan dan peran masing-masing dimasyarakat	-	Kesadaran pemangku wilayah sebagai pusat informasi warganya harus tahu aturan - aturan atau informasi yang perlu dipelajari dan disampaikan ke warga	tidak semua pemangku wilayah (ketua RT RW) bisa hadir karena kesibukan sebagai warga masyarakat bisa datang dan mengikuti kegiatan tersebut	

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Perbandingan capaian Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Utama Kemantren Kraton

Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target					Sumber data	
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan KemantrenKraton	300	306	320	341,67	3 46,67	351,67	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Data : Review Renstra 2017-2022

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kemantren Kraton telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Kraton Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dari hasil penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 ini telah melampaui dari target 346,67 yaitu terealisasi 364,67 atau 105,19 % , dan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021 juga melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Utama Kemantren Kraton

Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Capaian Kinerja (Realisasi)						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	251,33	362,33	353	350,67	364,67	-	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Data : Review Renstra 2017-2022

Keberhasilan pencapaian target Tahun 2021 yang sampai melebihi 100% dan selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh faktor pendukung antara lain :

1. Didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana juga tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III

2. Kesadaran dan partisipasi warga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kemantren Kraton
3. Kepemimpinan Mantri Pamong Praja dan Lurah di wilayah dalam melakukan pendekatan kepada mitra kerja pemerintah dan warga masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program dan kegiatan di Kemantren Kraton.
4. Fungsi koordinasi, pengawasan internal dan sinergitas antara Mantri Pamong Praja, Lurah dan seluruh karyawan sangat baik sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, meskipun secara kuantitas dan kualitas jumlah personil kurang
5. Semangat warga masyarakat untuk membangun wilayahnya
6. Respon terhadap pengaduan warga sangat baik (membantu koordinasi dengan OPD pemerintah kota agar penanganan lebih cepat).

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan organisasi

Penyandingan target dalam cascading jangka menengah (RPJMD) Kemantren Kraton dengan realisasi sampai dengan Tahun 2021 seperti dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.9
Penyandingan Target dan Realisasi RPJMD

Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat													
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target						Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	351,67	251,33	362,33	353	350,67	364,67	-

Berdasarkan table perbandingan diatas disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis sampai dengan Tahun 2021 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya dalam Bab ini dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Kraton dengan warga masyarakatnya. Saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten. Meskipun pada Tahun 2021 masih masa pandemi karena virus corona dan harus bangkit untuk memperbaiki perekonomian dikarenakan pandemi yang lama.

Target Akhir RPJMD atau target akhir renstra sudah tidak dapat dinaikkan sehingga Capaian Kinerja Kemantren Kraton di Tahun 2022 diharapkan mampu melebihi dari capaian di Tahun 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Standar nasional untuk perbandingan tingkat kemantren tidak ada, sehingga kami mencoba untuk membandingkan capaian sasaran strategis Kemantren Kraton dengan kemantren lain yang nilainya lebih tinggi dan maju mewakili Kota Yogyakarta untuk maju lomba kelurahan tingkat DIY yaitu Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman .

Capaian sasaran strategis Kemantren Gondokusuman pada Tahun 2021 adalah 400,6 dari target 400 sementara Kemantren Kraton capaian sasaran strategis Tahun 2021 adalah 364,67 dari target 346,67

Sesuai aturan dari pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari samapai dengan Desember

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
- c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Berdasar Permendagri tersebut bahwa Kemantren Kraton nilaia evaluasi kelurahan 364,67 sebenarnya sudah termasuk Kemantren dengan kategori cepat berkembang akan tetapi untuk lebih meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton maka akan disandingkan dengan Kemantren Gondokusuman yang nilai Evaluasi Kelurahan nya lebih tinggi yaitu 400,6 dan salah satu kelurahan nya yaitu kelurahan Terban maju mewakili Kota Yogyakarta untuk lomba tingkat DIY.

Dari situ kami mengevaluasi bahwa nilai evaluasi kelurahan Terban lebih tinggi dari kelurahan-kelurahan di Kemantren Kraton dikarenakan dalam pendokumentasiannya data dukung lebih tertib , dan ini menjadi pemicu bagi Kemantren Kraton kedepannya untuk lebih tertib dalam pendokumentasian dokumen pendukung Evaluasi Kelurahan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Kemantren Kraton pada tahun 2021 ini mencapai capaian kinerja yang baik dalam mencapai target kinerja. Pernyataan tersebut dapat didukung dengan data capaian kinerja sasaran maupun indikator kinerja program yang sudah diuraikan pada bab yang sama.

Dukungan terhadap pernyataan keberhasilan juga dapat dilihat pada program kerja yang dilaksanakan oleh Kemantren Kraton untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kemantren Kraton yang diuraikan pada Bab 2 laporan ini.

Indikator kinerja sasaran berupa Meningkatkan Perkembangan Pembangunan KemantrenKraton pada Tahun 2021 ditargetkan 346,67 sedangkan capaian realisasi dengan formulasi penghitungannya adalah jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan yang ada, maka diperoleh hasil 364,67 atau dengan capaian 105,19%, oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kemantren Kraton untuk Tahun 2021 dapat melampau hasil sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan
Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki KemantrenKraton maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA OPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya. Walaupun DPA Kemantren Kraton mengutamakan recovery dan pemulihan ekonomi paska pandemi virus corona namun dengan anggaran yang ada Kemantren Kraton mampu berjalan dengan baik.
- b. Kerjasama internal yang baik dan solid
Kerjasama antar unit atau jawatan/seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) KemantrenKraton dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada. Untuk memicu semangat kerja pegawai Kemantren Kraton maka setiap Tahunnya diadakan pemilihan Pegawai Pilihan dengan cara masing-masing pegawai memilih satu pejabat setruktural dan satu staf baik ASN maupun Tenaga Teknis/Naban sebagai salah satu cara pungutan suara untuk menentukan pegawai pilihan sehingga akan

dipilih satu pegawai struktural dan satu staf sebagai pegawai idol Kemantren Kraton. Pegawai yang terpilih akan mendapatkan sertifikat dan cinderamata, hal ini sebagai bentuk reward atau apresiasi kepada pegawai pilihan karena sudah bekerja dengan baik dan akan menjadi contoh serta memotivasi bagi pegawai yang lain. Karena sangat diharapkan para pegawai bisa bekerja dengan baik dan mampu saling bekerja sama dengan rekan kerja yang lain. Jika masing-masing pegawai bisa bekerja dengan optimal maka akan sangat mengurangi beban OPD yang disebabkan karena keterbatasan SDM yang ada sehingga diharapkan semakin mendukung capaian kinerja Kemantren Kraton untuk lebih baik lagi.

Namun demikian ada juga panisemen bagi pegawai yang melanggar tata tertib misalnya jika sering terlambat masuk kerja atau bekerja tidak sesuai dengan tugas fungsinya maka akan ditegur atasan langsung dan jika berulang-ulang akan diterbitkan surat peringatan oleh Mantri Pamong Praja dan mendapatkan hukuman disiplin.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. Dan Kemantren Kraton sudah rutin melaksanakan rapat internal pada Hari Senin pagi, dimana menjadikan forum untuk monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan seminggu yang lalu dan rencana kegiatan seminggu kedepan. Capaian Kinerja sasaran strategis juga menjadi pendorong pada semua aspek (jawatan dan kelurahan) untuk mencari solusi agar capaian kinerja akan lebih baik.

d. Dengan kemajuan teknologi informasi menunjang kinerja OPD untuk mempercepat kinerja dengan harapan program dan kegiatan dapat dengan cepat diakses dan dirasakan oleh masyarakat.

2. Faktor Eksternal

a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia

dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukkan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kemantren maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi sumber daya dapat dimaknai penggunaan sumberdaya yang terbatas namun dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Data terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya dari sisi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Anggaran 2021

No	Program/kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.622.623.404-	5.215.480.122	403.143.282-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	603.137.1995,-	588.842.260,-	14.294.939,-
3	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.464.800,-	94,106,000,-	2.358.800-
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.666.683.736,-	2.581.285.309,-	85.398.427,-
	a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan	735.710.809,-	730.055.185,-	5.655.824,-
	b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	983.384.776,-	927.759.052,-	5.5625.724,-

	Panembahan			
	c) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten	947.588.151,-	923.471.072,-	24.117.079,-

Berdasarkan data tersebut diatas, analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai Program yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi tersebut diatas dapat kami analisis sebagai berikut:

- a. Pada program Penunjang urusan pemerintahan daerah sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan. Oleh karena itu sisa anggaran tidak dipergunakan karena kebutuhan sudah tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah kebutuhan pembayaran gaji dan TPP pegawai dibayarkan sesuai kebutuhan jumlah ASN, pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan tagihan, untuk pemeliharaan kendaraan seperti penggantian suku cadang karena asumsi banyak kegiatan dilakukan secara daring sehingga pemakaian kendaraan bekurang frekuensinyadibanding sebelum masapandemi sehingga untuk mengalami penggantian suku cadang lebih kecil. Demikian untuk pembelian BBM juga sesuai kebutuhan, . Namun demikian hal itu tidak mengganggu pencapaian target. Dan ada juga efisiensi dari Pelaksanaan Belanja Modal di Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu berupa pengadaan Personal Computer, printer , Lcd, layar proyektor dll disitu ada sisa anggaran dikarenakan sesuai dengan harga yang disepakati dengan penyedia barang dan jasa .
- b. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berisi kegiatan yang diampu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial hampir semuanya berjalan dengan baik jika ada efisiensi itu karena pengurangan jumlah peserta karena masa pandemi seperti pada pelatihan tabulampot dan tanaman toga drainase sistim tetes jumlah peserta yang dalam DPA 40 orang akhirnya menjadi 30 orang.

- c. Pada Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, semua kegiatan terlaksana semua jika ada sisa anggaran karena efisiensi pada belanja foto copy materi di sosialisasi PKL dan pondokan yang digunakan hanya sesuai jumlah yang ada.
- d. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara analisis semua kegiatan pemberdayaan yang ada di ketiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten terlaksana dengan baik, jika ada efisiensi anggaran itu karena jumlah pelatihan atau sosialisasi dibatasi karena masa pandemi namun sekalipun demikian semua kegiatan dapat tersampaikan kepada masyarakat sekalipun dengan peserta yang tidak maksimal.. Dan juga untuk pekerjaan fisik Belanja Modal jalan Desa di Kelurahan Panembahan ada efisiensi dikarenakan sisa lelang dengan begitu dapat dianalisis bahwa dengan pelaksanaan pekerjaan fisik bisa terlaksana dengan baik sekalipun pagu tidak maksimal.

Selain itu juga ada efisiensi dari segi sumber daya manusia (SDM) . Jika dibandingkan dari formasi sesuai anjab di Kemantren Kraton maka jumlah pegawai yang ada masih belum sesuai namun dengan jumlah yang ada namun diharapkan semua pegawai bisa bekerja dengan maksimal. Semua pegawai bisa bekerja dengan efisien untuk mendukung kinerja organisasi secara maksimal.

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2021, Kemantren Kraton memiliki tiga program kerja yang mendukung Sasaran Strategis Kemantren Kraton sesuai dengan Perjanjian Kinerja. yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Tingkat perkembangan pembangunan KemantrenKraton meningkat dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan

pembangunan Kemantren Kraton. Target kinerja pada tahun 2021 adalah 346,67 sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan formulasi tercapai target 364,67. Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

- Keterkaitan antar program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diampu Jawatan Praja Kemantren Kraton dalam mengakomodir pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang merupakan sarana dalam pengukuran pencapaian target sasaran strategis dengan melibatkan masing-masing kelurahan yang mengampu kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada tiga kelurahan di Kemantren Kraton yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten.
- Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kemantren Kraton yaitu Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang diampu Jawatan Umum dan Jawatan Sosial. Serta Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang diampu Jawatan Keamanan.
- Adanya Keterbukaan Informasi Publik
Hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kemantren Kraton sehingga berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.
- Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan.
Keterlibatan warga masyarakat dalam musrenbang dari RT RW kelurahan dan kemantren. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kemantren dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kemantren Kraton pada pencapaian target Visi dan

Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik. Hal itu menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Kemantren Kraton.

2. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

Melihat analisis yang sudah diuraikandiatas, maka dapat disimpulkan tidak diperoleh gambaran yang signifikan hal yang menghambat dalam rangka pencapaian target kinerja KemantrenKraton. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas dan komitmen bersama bagi para pelaksana internal (ASN) harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Biarpun jumlah pegawai tidak sesuai dengan formasi anjab Kemantren Kraton .Dan Pada Tahun 2021 ini Kota Yogyakarta masih Pandemi Virus Corona sekalipun demikian semua Program dan Kegiatan tetap berjalan lancar meskipun dengan anggaran yang terbatas dan kegiatan kemasyarakatan harus sesuai protokol kesehatan.

g. Inovasi

Nama Inovasi :Layanan Informasi 1 Pintu 3 Jendela

Desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah/kota dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Salah satu pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Kemantren Kraton yaitu layanan perizinan non usaha dan layanan nonperizinan. Untuk memudahkan proses layanan tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan dari proposal ini adalah untuk menjelaskan mengenai terobosan inovasi dari Kemantren Kraton di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni dengan membuat pusat informasi layanan kemantren melalui media elektronik Whatsapp (WA) yang kemudian akan disalurkan ke media lainnya seperti website, instagram, dan facebook, berbasis teknologi

informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi berupa persyaratan perizinan atau nonperizinan serta informasi kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Kemantren Kraton. Dengan adanya pusat informasi kemantren ini dapat membantu masyarakat dalam meminimalisir kekurangan berkas yang diperlukan dan lebih cepat dari seharusnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung inovasi ini adalah:

1. Membuat Hotline WA yang terdiri dari RT/RW se-Kemantren Kraton
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan beserta link untuk menuju ke halaman website, instagram, dan facebook Kemantren Kraton untuk mendapatkan informasi lainnya.

Adapun kegiatan inovasi yang dapat memudahkan masyarakat Kemantren Kraton ini diberinama 1 pintu 3 jendela (1 pintu, WA; 3 jendela, website, instagram, dan facebook)

Dengan pelaksanaan inovasi ini diharapkan :

1. Masyarakat mendapatkan layanan informasi yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Mendorong partisipasi masyarakat, khususnya tokoh RT/RW dalam upaya menciptakan layanan informasi yang efektif dan efisien.
3. Menjadi sarana untuksaling bertukar informasi, baik mengenai pelayanan PATEN, kegiatan yang diselenggarakan Kemantren Kraton, maupun informasi lainnya yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Meminimalisir kesalahan atau kekurangan berkas pendukung yang diperlukan untuk mengurus suatu layanan perizinan atau nonperizinan Kemantren Kraton.

Inovasi ini lebih efektif dan efisien karena melibatkan tokoh RT/RW yang diharapkan dapat meneruskan informasi yang didapat melalui Hotline WA kepada warganya masing-masing se-Kemantren Kraton sehingga tercipta komunikasi yang tepat dan terarah.

Adapun untuk resiko dan tantangan dari inovasi ini adalah sebagai berikut :

Resiko :Pengambilankebijakan yang tidak tepat dalam upaya menciptakan pelayanan publik bagi kepentingan umum, dapat berpotensi menggagalkan upaya pemberian layanan yang efektif dan efisien di Kemantren Kraton.

Tantangan : Inovasi 1 pintu 3 jendela baru pertama kali dilaksanakan, sehingga membutuhkan koordinasi yang tepat dan kerja sama yang baik antara pegawai Kemantren Kraton, para tokoh RT/RW, serta masyarakat umum lainnya. Jangan sampai upaya menciptakan layanan informasi yang efektif dan efisien ini justru menimbulkan *miss communication* antara 3 pelaku sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan adanya inovasi tersebut.

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain inovasi 1 pintu 3 jendela Kemantren Kraton berusaha untuk mempertahankan inovasi yang sudah dilakukan sebelumnya , seperti:

1. Replikasi inovasi cetak dokumen kependudukan mandiri di kemantren. (Dilaksanakan 14 kemantren).
2. Memotivasi warga dalam penanggulangan covid-19 seperti “Panembahan Semanak” (Panembahan Semangat, Sehat, Manunggal. Agamis dan Kreatif) yang rutin penyemprotan desinfektan rutin hari minggu dengan dana swadaya
3. Kecepatan Informasi dalam penyampaian berita ke Tokoh dan warga masyarakat Kelurahan Kadipaten , “Dewa Imut” (Dengan WA informasi mudah tersampaikan).

h. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja

Kemantren Kraton selalu bersinergi dengan lintas sektoral salah satunya dengan terbentuknya Forkompimca (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan / Kemantren) yang beranggotakan Mantri Pamong Praja, Kapolsek dan Danramil. Namun demikian dalam pelaksanaanya juga mengikut sertakan Kepala KUA dan Kepala Puskesmas .

Dalam forum koordinasi tersebut mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang mendukung kestabilan program

kegiatan Kemantren Kraton, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas kemantren bagi kelancaran pembangunan wilayah Kemantren Kraton.

Kolaborasi yang baik tersebut sangat mendukung dan menunjang capaian kinerja Kemantren Kraton misal dengan mengatasi kerawanan wilayah sehingga tingkat kriminal bisa diminimalisir. Dalam pelaksanaan hal tersebut Kemantren Kraton harus mengikut sertakan Polsek dan Koramil, kemudian contoh lain dalam mengatasi jenazah terlantar selain Polsek dan Puskesmas juga harus mengikut sertakan Puskesmas. Peran KUA disini jika terjadi kejadian yang berkaitan dengan agama semisal ada jenazah yang diributkan akan di kebumikan secara agama apa ketika agama di KTP berbeda dengan agama ahli warisnya.

Yang diuraikan diatas hanya sebagian kecil saja dari kejadian yang ada, karena sebenarnya banyak hal yang harus dikoordinasikan terkait kewilayahan baik dari segi ketentraman ketertiban, kesehatan maupun agama.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Kemantren Kraton pada Tahun 2021 sebesar 94,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,76%, untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar 97,63% , sedangkan realisasi untuk Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 98,37% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi sebesar 96,80%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program dan kegiatan maka bisa dilihat penyerapan anggaran rata-rata sudah diatas 95% hanya ada satu program yang masih diangka 92,76% yaitu di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota dan disitu ada efisiensi anggaran gaji yang cukup besar dikarenakan memang jumlah pegawai di Kemantren Kraton tidak sesuai dengan jumlah di dalam anjab, dan adanya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2021

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Prosentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.622.623.404,-	5.215.483.122,-	92,767 %
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.610.000.	13.607.000	99.98%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.960.000	2.957.000	99,90%
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.350.000	5.350.000	100%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.300.000	5.300.000	100%
	b. Administrasi Keuangan	4.553.995.180	4.226.484.073	92,81%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.545.305.180	4.226.484.073	92,81%
	2. Pelaksanaan Penatausahaan Tugas ASN	160.000	160.000	100%
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	160.000	160.000	100%

	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.680.000	1.680.000	100%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1550000	1541250	99,44%
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	460000	457050	99.36%
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4.080.000	4.080.000	100%
	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000	600.000	100%
	3. Administrasi Umum	207.687.672	204.113.137	98,28%
	1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.044.945	15.011.300	99,78%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.946.527	80.264.962	96,77%
	3.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.314.200	41.980.875	99,21%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1500.000	100%
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.882.000	65.356.000	99,20%
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.958.000	172.357.300	94,21%
	1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.958.000	172.357.300	94,21%
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	466.307.092	422.886.395	90,69%

	Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	100%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.700.000	64.724.147	63,64%
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.807.092	357.362.248	98.23%
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	198.065.460	176.032.217	88,88%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	62.344.000	46.387.757	74,41%
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.750.000	33.187.500	85,65%
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.971.461	96.456.960	99,47%
2.	Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	603.137.199	588.842.260	97,63 %
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	239.006.750	588.842.260	98,05%
	1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	239.006.750	234.352.000	98.05%
	b. Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Pelayanan Umum	82.880.419	75.593.876	91,21%
	1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	82.880.419	75.593.876	91,21%
	c. Pelaksanaan Urusan	281.250.030	278.896.384	99,16%

	Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			
	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	27.146.085	26.994.000	99,44%
	2. .Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	91.584.545	91.145.984	99,52%
	3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	162.519.400	160.756.400	98,92
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.501.700,-	52.628.000,-	98,37 %
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.501.700	52.628.000	98.37%
	1.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	53.501.700	52.628.000	98,37%
	b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	42.963.100	41.478.000	96.54%
	1.Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	42.963.100	41.478.000	96,54%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.666.683.736	2.581.285.309	96,80 %
	a. Pemberdayaan Kelurahan Patehan	735.710.809	730.055.185	99,18 %

	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)	311.910.000	309.523.000	99,23%
	2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)	423.800.809	420.532.185	99,23%
	b. Pemberdayaan Kelurahan Panembahan	983.384.776	927.759.052	94,34 %
	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)	548240000	495546692	90,39%
	2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)	435144776	432212360	99,33%
	a. Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten	947.588.151	923.471.072	97,45%
	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)	478.986.730	458.681.000	95,76%
	2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)	468.601.421	464.790.072	99,19%
	Total	8.988.909.139	8.479.713.691	94,34%

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk capaian total belanja langsung sebesar 94,34% yang terdiri dari Belanja Gaji dan TPP sebesar 92,79 % dan Belanja non Gaji dan TPP sebesar 95,91%.

BAB IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada tahun 2021 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Review Rencana Strategis (Renstra). Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Dengan kata lain Kemantren Kraton berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja kemantren yang dilaksanakan oleh aparat kemantren tidak lepas dari sinergisitas antara masyarakat, kelurahan, kemantren ,pemerintah kota serta kolaborasi lintas sektoral.

2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan memperhatikan uraian data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi OPD Kemantren Kraton pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja OPD Kemantren Kraton dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan kemudian menyelesaikan LPJ nya tepat waktu.
2. Pengoptimalan perencanaan kegiatan pada awal penyusunannya
3. Pelaksanaan Evaluasi Program Kegiatan yang dilaksanakan setiap Senin pagi akan terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat untuk evaluasi dari pelaksanaan program kegiatan dan rencana seminggu kedepan.
4. Melaksanakan monitoring di tingkat kelurahan maupun tingkat-tingkat di atasnya secara optimal dan upaya pemecahan permasalahan yang dapat menghambat kinerja OPD
5. Mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sumberdaya manusia yang tersedia di segala bidang dan listas sektoral.
6. Keterbatasan jumlah SDM yang tidak sesuai kebutuhan anjab Kemantren Kraton diupayakan agar tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target kinerja dengan cara mengoptimalkan pegawai yang ada senyampang diusulkannya ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pemenuhan personil yang dibutuhkan sesuai formasi anjab Kemantren Kraton.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Kraton semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kemantren Kraton Tahun 2021 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta 31 Desember 2021
Mantri Pamong Praja
Kemantren Kraton

Drs. SUMARGANDI, MSi
NIP. 196903121989031005